



**PERENCANAAN DAK TAHUN 2016
SUB BIDANG SARPRAS PP DAN DAMKAR
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN**

Oleh:

Drs. SAFRIZAL, ZA, M.Si
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN

JAKARTA, 10 FEBRUARI 2016

I. AGENDA RAPAT

A. Evaluasi DAK Bidang Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan T.A 2015

1

Penyerapan DAK Sub Bidang Praspem Satpol PP

2

Penyerapan DAK Sub Bidang Praspem Damkar

B. Konsolidasi Persiapan Pelaksanaan DAK Bidang Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan T.A 2016

II. TUJUAN



Evaluasi Perkembangan Penyerapan Anggaran:

- Penyerapan DAK Sub Bidang Praspem Satpol PP per Daerah Tahun 2015
- Penyerapan DAK Sub Bidang Praspem Damkar per Daerah Tahun 2015



Evaluasi Capaian:

1. Pembangunan gedung/kantor Satpol-PP
2. Pengadaan kendaraan pengendali masa (Dalmas)
3. Pengadaan kendaraan Patroli dan kendaraan angkut
4. Pengadaan peralatan alat pelindung diri

1. Pembangunan Kantor damkar berikut gudang dan garasi mobil
2. pembangunan Pos Kesiapsiagaan Pemadam Kebakaran dan tandon air
3. Pengadaan mobil pemadam dilengkapi alat pemadam hutan dan lahan
4. Pengadaan alat penyelamatan/rescue (SAR)
5. Pengadaan alat pelindung diri petugas pemadam



Identifikasi Permasalahan

INDIKATOR DAN CAPAIAN DAK SUB BIDANG SATPOL PP

Cakupan Pelaksanaan SPM

UNTUK PROVINSI :

1. Cakupan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah;
2. patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
3. Jumlah satuan linmas di Kab/Kota)

UNTUK KABUPATEN/KOTA :

1. Cakupan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah;
2. patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
3. Rasio jumlah satuan linmas per RT atau sebutan lainnya).
4. Tingkat pelanggaran perda dan jumlah perda yang ditegakan Satpol PP

Peta Potensi Gangguan

UNTUK PROVINSI :

1. Jumlah beserta luas masing-masing Kab/Kota;
2. Jumlah beserta luas masing-masing Kecamatan di setiap Kab/Kota;
3. Jumlah dan Jenis potensi gangguan disetiap Kab/Kota;
4. Personil Satpol PP (Jumlah PNS maupun honor di Prov)
5. PPNS (Jumlah, Jenis kewenangan dan Sebaran PPNS pada setiap SKPD di Prov)
6. Jumlah Personil Satlinmas di Prov

UNTUK KABUPATEN/KOTA :

1. Jumlah beserta luas masing-masing Kecamatan;
2. Jumlah beserta luas masing-masing Kelurahan /Desa di setiap Kecamatan;
3. Jumlah beserta luas masing-masing RT/RW (sebutan lainnya) di setiap Kelurahan/Desa.
4. Jumlah dan Jenis potensi gangguan disetiap kecamatan;
5. Personil Satpol PP (Jumlah PNS maupun honor di Kab/Kota)
6. PPNS (jumlah, jenis kewenangan, sebaran PPNS pada setiap SKPD Kab/Kota)
7. Jumlah Personil Satlinmas di Kab/Kota

INDIKATOR DAN CAPAIAN DAK SUB BIDANG PEMADAM KEBAKARAN

1. Intensitas Kebakaran (Kebakaran Pemukiman, Kebakaran Non Pemukiman, Kebakaran Lainnya).
2. Capaian Target SPM (Cakupan, Respon Time (menit), Rasio Personil dan Rasio Sarpras).
3. Prasarana Pemadam Kebakaran yang di dalamnya terdapat Kepemilikan Bangunan (Sewa/Gabung, Milik Pemda), Kondisi Bangunan (rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat). Adapun prasarana tersebut terbagi atas 2 (dua) jenis, diantaranya :
 - a. Gedung Kantor Pemadam Kebakaran berikut Gudang dan Garasi; dan
 - b. Pos Pemadam Kebakaran dan Tandon Air.
4. Sarana Pemadam Kebakaran, yang di dalamnya terbagi atas 3 (tiga) jenis, diantaranya :
 - a. Kendaraan Mobil Pemadam dilengkapi alat pemadam hutan dan lahan;
 - b. Alat Penyelamatan/*Rescue* (SAR).
 - c. Alat proteksi petugas pemadam kebakaran.

SURAT MENTERI KEUANGAN No. S-239/PK/2014 (Penyampaian Pagu per Bidang DAK T.A 2015)

Pengalokasian DAK
Bidang Praspem Daerah
Ditjen Bina Adwil

Sub Bidang Praspem Satpol PP (DAK Murni)

Rp.126.000.000.000

1. Pembangunan gedung/ kantor Satpol-PP
2. Pengadaan kendaraan pengendali masa (Dalmas)
3. Pengadaan kendaraan Patroli dan kendaraan angkut
4. Pengadaan peralatan alat pelindung diri

Sub Bidang Praspem Damkar (DAK Murni)

Rp.155.000.000.000

1. Pembangunan Kantor damkar berikut gudang dan garasi mobil
2. pembangunan Pos Kesiapsiagaan Pemadam Kebakaran dan tandon air
3. Pengadaan mobil pemadam dilengkapi alat pemadam hutan dan lahan
4. Pengadaan alat penyelamatan/rescue (SAR)
5. Pengadaan alat pelindung diri petugas pemadam

“Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik di daerah pemekaran, daerah induk, daerah yang terkena dampak pemekaran, serta daerah lainnya yang sarana dan prasarana Satpol PP dan Pemadam Kebakarannya dikategorikan belum layak dan belum memadai”

KONSISTENSI ALOKASI DAK BIDANG DITJEN BINA ADWIL TERHADAP TARGET PENCAPAIAN SPM

Berdasarkan Renstra Kemendagri 2015-2019

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR		TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya standardisasi dan kualitas implementasi teknis kebijakan bidang pol pp dan linmas serta pencegahan dan penganggulangan bencana dan bahaya kebakaran						
1	Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM	20%	30%	40%	50%	60%
2	Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM	10%	20%	30%	40%	50%

PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA BIDANG TRAMTIBUM SESUAI SPM TAHUN 2015

Indikator	:	Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM
Target	:	20%



Kab/Kota	Variabel Pengukuran (Bobot 100%)			Rata-Rata Capaian Kinerja per Daerah
	Cakupan Penegakkan Perda dan Peraturan Kepala daerah Kab/Kota (bobot 35%)	Patroli Siaga Tibum dan Transmas (bobot 35%)	Rasio Petugas Linmas di Kab/Kota (bobot 30%)	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
dst				

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Tujuan

B. HASIL PELAKSANAAN DAK

C. PERMASALAHAN

1. Perencanaan
2. Penganggaran
3. Pelaksanaan
4. Pemantauan
5. Evaluasi

D. PENUTUP

1. Saran dan Masukan Daerah
2. Rekomendasi Kebijakan untuk Pemerintah Pusat

FORM PELAPORAN DAK SUB BIDANG SATPOL PP dan DAMKAR

FORM I

LAPORAN KEMAJUAN PER TRIWULAN
DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN ... / ...
(Diisi oleh Sekda Kabupaten/Kota dan Provinsi)

Provinsi
Kab/Kabupaten
SKPD
Bidang

Form I

No.	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan						Pelaksanaan Kegiatan		Realisasi		Kesesuaian sasaran dan lokasi dengan RKPD		Kesesuaian antara DPA-SKPD dengan Petunjuk Teknis		Kodeifikasi Masalah
		Suban	Volume	Jumlah Penerima Manfaat ^(*)	Jumlah			Swakelola (Rp-juta)	Kontrak (Rp-juta)	Fisik (%)	Keuangan (%)	YA	TIDAK	YA	TIDAK	
					DAK (Rp-juta)	Pendamping (Rp-juta)	Total Biaya (Rp-juta)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13a	13b	14a	14b	15
Total																

Kodeifikasi Masalah :

Kode Masalah

1. Permasalahan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
2. Permasalahan terkait dengan Petunjuk Teknis
3. Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
4. Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD
5. Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan
6. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak
7. Permasalahan terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola
8. Permasalahan terkait dengan Penetapan SP2D
9. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak
10. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola

..... 200

Sekda Kabupaten/Kota/Provinsi

Np.

Keterangan

1. Pelaksana DAK adalah SKPD Kabupaten/Kota terkait yang bertanggung jawab terhadap bidang DAK masing-masing
 2. Bidang DAK sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
 3. Kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis masing-masing bidang DAK
 4. Kolom 14 diisi dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan yang terkait dengan kode masalah yang tersedia
- (*) Saluran penerima manfaat disesuaikan dengan kegiatan di masing-masing bidang DAK

**LAPORAN KEMAJUAN PER TRIWULAN
CHECKLIST DOKUMEN DAN KEGIATAN PELAKSANAAN
DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN /
(Diisi oleh Sekda Kabupaten/Kota dan Provinsi)**

Form II

No.	Dokumen/Kegiatan	Waktu	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
I	PERENCANAAN		
1	PMK (Alokasi dan Pedoman Umum)		
2	Petunjuk Teknis (Juknis)		
3	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD		
4	Penetapan DPA-SKPD		
II	PELAKSANAAN		
5	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan		
6	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
7	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
8	Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak		
9	Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola		
10	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		
11	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		
12	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		

Keterangan

- Kolom 3 Nomor 1, Diisi tanggal diterimanya PMK oleh Daerah
- Kolom 3 Nomor 2, Diisi tanggal diterimanya Juknis oleh Daerah
- Kolom 3 Nomor 3, Diisi tanggal Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
- Kolom 3 Nomor 4, Diisi tanggal diterbitkannya DPA-SKPD
- Kolom 3 Nomor 5, Diisi tanggal ditetapkannya SK Penetapan Pelaksana Kegiatan
- Kolom 3 Nomor 6, Diisi tanggal (range) dilaksanakannya kegiatan tender untuk pekerjaan kontrak
- Kolom 3 Nomor 7, Diisi tanggal (range) dilaksanakannya persiapan swakelola
- Kolom 3 Nomor 8, Diisi tanggal Dilaksanakannya Pekerjaan Kontrak
- Kolom 3 Nomor 9, Diisi tanggal dilaksanakannya pekerjaan swakelola
- Kolom 3 Nomor 10, Diisi tanggal diterbitkannya SPP oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran
- Kolom 3 Nomor 11, Diisi tanggal diterbitkannya SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
- Kolom 3 Nomor 12, Diisi tanggal diterbitkannya SP2D diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM

Penyerapan DAK Sub Bidang Praspem Satpol PP T.A 2015

DAK Sub Bidang	Unit	Alokasi Anggaran		Total Anggaran (000)	Realisasi (000)	%
		DAK (000)	Pendamping (000)			
Praspem Satpol PP		126.000.000	13.170.023	139.251.763	45.288.913	35,94
1	Pembangunan gedung/ kantor Satpol PP					
2	Pengadaan kendaraan pengendali masa (Dalmas)					
3	Pengadaan kendaraan Patroli dan kendaraan angkut					
4	Pengadaan peralatan alat pelindung diri					

Sumber : Data Realisasi Keuangan berdasarkan Klarifikasi pada Acara Rapat Evaluasi DAK 2015, tgl 5 November 2015 di Batam

- Jumlah Daerah Penerima DAK Sub Bidang Praspem Satpol PP Sebanyak 54 Daerah.
- Daerah yang telah menyampaikan laporan dan Realisasi Keuangan sebanyak 35 Daerah. ◀

Penyerapan DAK Sub Bidang Praspem Damkar T.A 2015

DAK Sub Bidang	Unit	Alokasi Anggaran		Total Anggaran (000)	Realisasi (000)	%
		DAK (000)	Pendamping (000)			
Praspem Damkar		155.018.000	16.397.432	171.413.432	40.165.268	25,91
1	Pembangunan Kantor damkar berikut gudang dan garasi mobil					
2	Pembangunan Pos Kesiapsiagaan Damkar dan tandon air					
3	Pengadaan mobil pemadam dilengkapi alat pemadam hutan dan lahan					
4	Pengadaan alat penyelamatan /rescue (SAR)					
5	Pengadaan alat pelindung diri petugas pemadam					

Sumber : Data Realisasi Keuangan berdasarkan Klarifikasi pada Acara Rapat Evaluasi DAK 2015, tgl 5 November 2015 di Batam

- Jumlah Daerah Penerima DAK Sub Bidang Praspem Damkar Sebanyak 54 Daerah.
- Daerah yang telah menyampaikan laporan dan Realisasi Keuangan sebanyak 26 Daerah. ◀

KENDALA PELAKSANAAN DAK TAHUN 2015

Perencanaan

- Peran Pemerinath Prov sbg Wk Pemerintah Pst yang belum optimal
- Data teknis yang disampaikan tdk lengkap

Penganggaran

- Perda APBD dan DPA terlambat ditetapkan
- Dokumen persyaratan terlambat dikirimkan atau tidak memenuhi syarat
- Ketidaksesuaian alokasi dengan kebutuhan daerah

Pengalokasian

- Kesulitan dalam pengalokasian dana pendaping DAK
- Pemda harus mengalokasikan dana untuk kegiatan non fisik, sementara APBD terbatas

Pelaksanaan

- Terlambatnya pelaksanaan tender kegiatan
- Rotasi dan mutasi pelaksanaan DAK di daerah

Monev dan Pelapaoran

- Belum semua Daerah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan DAK
- Format laporan tidak sesuai dengan lampiran PMK
- Laporan belum terkoordinir

ALOKASIAN DAK BIDANG PRASPEM DAERAH DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN T.A 2016



Sub Bidang Prasarana Satpol PP

Rp.66.597.530.000

1. Pembangunan gedung/kantor Satpol-PP:
 - a. Pembangunan Kantor Satpol PP
 - b. Pos pantau Tibum Tranmas
2. Pengadaan Kendaraan:
 - a. Pengendali Masa (Dalmas)
 - b. Patroli Satpol PP
 - c. Kendaraan Angkut
3. Pengadaan Peralatan Satpol PP:
 - a. Peralatan Pelindung Diri
 - b. Peralatan Komunikasi

Sub Bidang Prasarana Pemadam Kebakaran

Rp.74.216.740.000

1. Pembangunan Kantor damkar;
2. Pembangunan gudang dan garasi Damkar
3. Pembangunan Pos Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Damkar
4. Pengadaan Kendaraan Damkar
5. Pengadaan Kendaraan Support Damkar
6. Pengadaan alat proteksi Damkar
7. Pengadaan alat pertolongan dan penyelamatan korban kebakaran.

TERIMA KASIH

